



PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH



Tahun
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR	7
2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi.....	7
2.2 Kependudukan	9
2.3 Kondisi Perekonomian	10
2.4 Pembangunan Manusia.....	18
BAB III ANALISIS KETIMPANGAN KALIMANTAN TIMUR	21
3.1 Ketimpangan Pendapatan.....	21
3.2 Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)	29
BAB IV KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN COVID-19	37
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Timur, 2019 - 2020	8
Tabel 2.2 Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2020	8
Tabel 2.3 Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2020	10
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2017 – 2020	11
Tabel 2.5 Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2019-2020	12
Tabel 2.6 Perekonomian Kalimantan Timur dari Sisi Pengeluaran, 2019-2020	14
Tabel 2.7 PDRB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020.....	15
Tabel 2.8 Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2020.....	16
Tabel 2.9 Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2019-2021	17
Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021	17
Tabel 2.11 Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2020 ..	18
Tabel 2.12 Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2020	20
Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribu Rupiah)	30
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.....	34
Tabel 3.3 Produktivitas PDRB Per Tenaga Kerja Menurut Penduduk Yang Bekerja Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	35
Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2021	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kalimantan Timur	7
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2011-2020	11
Gambar 2.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2010-2020	19
Gambar 3.1 Indeks Gini Indonesia Menurut Tipe Wilayah, Tahun 2016-2021	24
Gambar 3.2 Indeks Gini Kalimantan Timur, Tahun 2016-2021	25
Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Terendah Kalimantan Timur, Maret 2017-Maret 2021	27
Gambar 3.4 Perkembangan Penduduk Miskin menurut Kriteria, September 2018-Maret 2020.	28
Gambar 3.5 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Provinsi di Indonesia.....	30
Gambar 3.6 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Provinsi Regional Kalimantan.....	32
Gambar 3.7 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.....	33
Gambar 3.8 Indeks Williamson Produktivitas Tenaga Kerja Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur	35
Gambar 3.9 Tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2020	36
Gambar 4.1 Persentase Responden Mengaku Mengalami Penurunan Pendapatan menurut Kelompok Pendapatan Hasil Survei Pandemi Covid-19 bagi Perilaku Masyarakat, Tahun 2020.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam wilayah tersebut tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi seharusnya berjalan selaras, sehingga terdapat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pada seluruh lapisan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan ekonomi, hanya akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, misalnya antara masyarakat yang kaya dan yang miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (wilayah maju dan wilayah tertinggal).

Ketimpangan yang tinggi dalam suatu wilayah/negara berpotensi dalam menciptakan berbagai permasalahan sosial-ekonomi, misalnya kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Selain itu, dampak lain yang dapat terjadi adalah adanya peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju. Jika penduduk migran tersebut tidak dapat segera terserap dalam lapangan pekerjaan untuk bekerja secara produktif, maka akibatnya adalah tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut menjadi rendah. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta rasa ketidakpuasan masyarakat, yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tindakan kriminal, konflik antar masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketimpangan antar wilayah juga masih merupakan suatu hal yang menjadi perhatian dalam proses pembangunan di Indonesia. Rentang luas wilayah Indonesia yang cukup besar menjadi salah satu factor penyebab tidak meratanya pembangunan yang berakibat pada timbulnya ketimpangan, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antar provinsi, antar kabupaten, serta antara kota dengan kabupaten. Terkait hal tersebut, Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong upaya transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Hal ini karena salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan di Indonesia adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Isu strategis yang juga menjadi fokus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah ketimpangan antar provinsi dalam wilayah pulau. Pulau Kalimantan tercatat memiliki ketimpangan yang cukup tinggi. Ukuran ketimpangan merupakan salah satu indikator capaian kebijakan distribusi pembangunan serta hasil-hasilnya. Dengan demikian, tingkat ketimpangan yang tinggi memberikan indikasi bahwa hasil pembangunan belum merata dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Selain itu, isu ketimpangan juga termasuk kedalam salah satu hal yang disoroti dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, yaitu pada tujuan kesepuluh. Tujuan ini menyatakan bahwa pada tahun 2030 kesenjangan atau ketimpangan di dalam dan antar negara semakin berkurang. Isu tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian karena kesenjangan yang terjadi dapat mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas

bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan, perlu diwujudkan untuk memastikan terciptanya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar kelompok dan wilayah

Perekonomian Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah Pulau Kalimantan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan tidak diikuti oleh adanya pemerataan hasil pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota. Sebagai contoh, beberapa wilayah di Kalimantan Timur masih sulit untuk diakses karena keterbatasan infrastruktur transportasi. Sulitnya akses masuk ke suatu wilayah, menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan wilayah dengan akses yang sulit tersebut menjadi relatif lebih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.

Selain itu, akses yang sulit juga berdampak terhadap arus distribusi barang, yang berimplikasi pada tingginya tingkat harga konsumen di wilayah tersebut. Kondisi tersebut akan menciptakan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota karena wilayah dengan aksesibilitas yang rendah akan cenderung sulit berkembang, dan tingkat harga barang-barang pada wilayah tersebut akan sangat tinggi sehingga nantinya akan berdampak terhadap kondisi daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam, yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal karakteristik ekonominya, yaitu berbasis sumber daya alam, namun besaran nilai tambah yang dihasilkan cukup berbeda. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, 50 persen dari total PDRB Kalimantan Timur adalah diperoleh dari kontribusi yang cukup tinggi dari aktivitas ekonomi di tiga kabupaten/kota. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (25,46 persen), Kabupaten Kutai Timur (19,9 persen), dan Kota Balikpapan (15,09 persen). Sedangkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu hanya berkontribusi sebesar 0,40 persen terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Selain disparitas ekonomi, terdapat pula disparitas jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari persebaran jumlah penduduk yang belum merata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari total penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 juta jiwa, hanya sekitar 32,5 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu (atau sekitar 0,86 persen). Perbedaan jumlah penduduk ini juga yang memberikan dampak terhadap capaian kinerja pertumbuhan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan analisis ini antara lain:

1. Tersedianya analisis tingkat ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tersedianya analisis mengenai kondisi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
3. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
4. Mengetahui strategi yang dapat digunakan dapat mengatasi ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur
5. Memberikan rekomendasi mengenai upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

BAB II GAMBARAN UMUM KALIMANTAN TIMUR

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi



Gambar 2.1 Peta Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah Provinsi terluas ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan terluas keempat di Indonesia yaitu seluas 127.346,92 km². Adapun secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Utara : Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia
- Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan
- Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Timur : Laut Sulawesi dan Selat Makassar

Kondisi astronomis Kalimantan Timur pada wilayah Indonesia terletak antara 2° 33' LU - 2° 25' LS dan 113° 44' BT - 119° 00' BT. Berdasarkan letak astronomis ini, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan posisi tersebut, secara umum wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kawasan tropis sehingga cuacanya sangat panas. Suhu di Kalimantan Timur berkisar 22 ° C hingga 37 ° C, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 74 – 87 persen. Secara umum, kondisi topografi di Kalimantan Timur berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan air laut.

Tabel 2.1 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Timur, 2019 - 2020

Unsur Iklim	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Suhu (° C)		
Minimum	21,7	22,2
Rata-Rata	27,7	27,6
Maksimum	34,5	34,3
Kelembaban Udara (%)		
Minimum	42,0	39,0
Rata-Rata	85,7	87,0
Maksimum	100,0	100,0
Tekanan Udara (mb)		
Minimum	1 004,1	1 002,6
Rata-Rata	1 009,4	1 008,7
Maksimum	1 014,4	1 014,5
Kecepatan Angin (m/det)		
Rata-Rata	2,1	1,96
Maksimum	22,6	11,3
Jumlah Curah Hujan (mm)		
Jumlah Hari Hujan (hari)	2 367,0	4 071,6
Jumlah Hari Hujan (hari)	200,0	247,0
Penyinaran Matahari (%)		
	44,8	58,8

Catatan: Provinsi Kalimantan Timur terdapat 3 stasiun BMKG, yakni di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Pembagian daerah administrasi di Kalimantan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kutai Timur, mencapai 24,38 persen dari total luas wilayah Kalimantan Timur, sedangkan yang terkecil adalah Bontang yaitu hanya 0,13 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.2 Daerah Administrasi Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	Tanah Grogot	11 096,96	10	144
Kutai Barat	Sendawar	13 709,92	16	194
Kutai Kartanegara	Tenggarong	25 988,08	18	237
Kutai Timur	Sangata	31 051,71	18	141
Berau	Tanjung Redeb	21 735,19	13	110
Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	2 923,73	4	54
Mahakam Ulu	Long Bagun	19 449,41	5	50
Balikpapan	Balikpapan	512,25	6	34
Samarinda	Samarinda	716,53	10	59
Bontang	Bontang	163,14	3	15
Kalimantan Timur	Samarinda	127 346,92	103	1 038

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Keseluruhan kabupaten/kota tersebut terdiri dari 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 237 desa/kelurahan. Sementara itu, kabupaten dengan kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, yaitu masing-masing sebanyak 18 kecamatan. Wilayah dengan jumlah kecamatan serta desa/kelurahan paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah Kota Bontang, yaitu hanya terdapat 3 kecamatan dan 15 desa/kelurahan.

2.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk di Kalimantan Timur adalah sebanyak 3.766.039 jiwa. Dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 52,09 persen, atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat persebarannya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kota Samarinda, yaitu sebanyak 827.994 jiwa. Wilayah lain dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 729.382 jiwa, dan Kota Balikpapan, sebanyak 688.318 jiwa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana jumlah penduduk adalah sebesar 3.028.487 jiwa, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur tahun 2010-2020 adalah sebesar 2,13 persen. Laju pertumbuhan penduduk tercepat antara tahun 2010-2020 adalah di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 5,27 persen. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, dimana terdapat aktivitas pertambangan batubara dengan skala yang besar di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah terjadi di Samarinda dan Kutai Kartanegara, yaitu masing-masing hanya sebesar 1,26 persen dan 1,48 persen.

Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah di Kota Balikpapan. Dimana tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 1.343,74 jiwa/km², yang artinya setiap 1 km² wilayah di Kota Balikpapan dihuni oleh sekitar 1.343 jiwa penduduk. Sedangkan wilayah dengan penduduk terjarang adalah di Mahakam Ulu yang angka kepadatan penduduknya hanya 1,67 jiwa/km². Secara umum, kepadatan penduduk di Kalimantan Timur adalah 29,57 jiwa/km², menggambarkan bahwa dengan luas wilayah yang cukup besar, yaitu mencapai 128 ribu hektar, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kalimantan Timur relatif sedikit.

Tingginya angka kepadatan penduduk di wilayah kota (Samarinda, Balikpapan, Bontang) disebabkan karena ketiga wilayah tersebut merupakan pusat bisnis atau pemerintahan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi atau pemerintahan, maka wilayah perkotaan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan migrasi ke kota.

Tabel 2.3 Statistik Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/ Kota	Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	143 647	131 805	275 452	24,82	1,75
Kutai Barat	91 327	80 961	172 288	12,57	2,02

Kutai Kartanegara	380 560	348 822	729 382	28,07	1,48
Kutai Timur	234 761	199 698	434 459	13,99	5,27
Berau	133 163	114 872	248 035	11,41	3,20
Penajam Paser Utara	92 506	86 175	178 681	61,11	2,18
Mahakam Ulu	17 308	15 205	32 513	1,67	2,58
Balikpapan	352 802	335 516	688 318	1 343,73	2,06
Samarinda	422 624	405 370	827 994	1 155,57	1,26
Bontang	92 936	85 981	178 917	1 096,69	2,15
Kalimantan Timur	1 961 634	1 804 405	3 766 039	29,57	2,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

2.3 Kondisi Perekonomian

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian kinerja pembangunan ekonomi. Besaran PDRB mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Angka PDRB juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian target dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pada tahun 2020, besaran PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp607,32 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp44,84 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp652,16 triliun. Jika memperhitungkan jumlah penduduk, maka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2020 adalah sebesar Rp160,11 juta. Nilai tersebut juga mengalami penurunan sebesar 4,68 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2019, yang sebesar Rp175,25 juta. Penurunan besaran PDRB ini akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang secara signifikan menyebabkan penurunan kinerja berbagai sektor ekonomi karena adanya penerapan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat untuk menekan penyebaran virus tersebut.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Kalimantan Timur, 2017 – 2020

Uraian (1)	Tahun			
	2017 (2)	2018 (3)	2019* (4)	2020** (5)
PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)	591 903,49	635 498,68	652 158,06	607 320,78
PDRB adh Konstan 2010 (Miliar Rp)	452 741,91	464 694,43	486 712,24	472 864,89
PDRB per Kapita adh Berlaku (Juta Rp)	165,55	174,17	175,25	160,11

Uraian (1)	Tahun			
	2017 (2)	2018 (3)	2019* (4)	2020** (5)
PDRB per Kapita adh Konstan 2010 (Juta Rp)	126,63	127,35	130,79	124,66

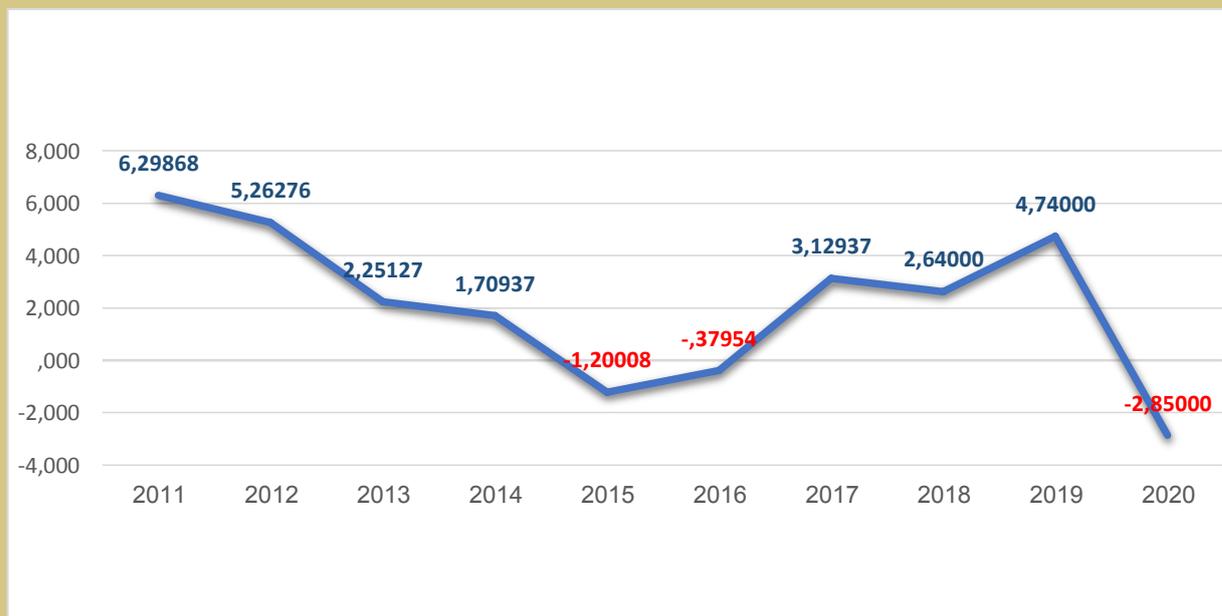
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Sementara itu, besaran laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2011-2020 cukup fluktuatif. Sepanjang tahun 2011 hingga 2014, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, kemudian mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada periode tahun 2015-2016. Sejak 2017 terdapat perbaikan ekonomi, dimana laju pertumbuhan Kalimantan Timur bernilai positif, sebesar 3,13 persen, walaupun sedikit melambat di tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,64 persen, kemudian mengalami percepatan di tahun 2019 dengan pertumbuhan 4,74 persen. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 menyebabkan penurunan kinerja berbagai sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,85 persen jika dibandingkan tahun 2019. Beberapa kebijakan pengetatan dan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19 berlangsung menyebabkan kegiatan produksi di berbagai sektor menjadi terhambat.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur, 2011-2020

a. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2020, struktur perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perekonomian wilayah masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Hal ini dilihat dari dominasi lapangan usaha sektor Pertambangan dan Pengalihan dengan besaran nominal PDRB sebesar Rp251,60 triliun. Diikuti dengan sektor Industri Pengolahan, yang utamanya ditopang oleh

Industri Pengilangan Migas, dengan nominal sebesar Rp114,77 triliun. Kedua sektor secara bersama menguasai hampir 60 persen perekonomian Kalimantan Timur. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 41,43 persen terhadap total penciptaan nilai tambah di Kalimantan Timur. Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 17,82 persen.

Tabel 2.5 Kondisi Perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, 2019-2020

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51 567,38	53 282,04	7,91	8,77	3,91	-1,12
B. Pertambangan dan Penggalian	297 371,39	251 602,43	45,60	41,43	6,89	-4,58
C. Industri Pengolahan	116 204,90	114 773,79	17,82	18,90	0,03	-2,77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	344,96	385,18	0,05	0,06	8,67	11,59
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	307,67	326,37	0,05	0,05	4,84	5,28
F. Konstruksi	58 474,32	57 866,11	8,97	9,53	5,71	-1,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38 245,24	39 228,07	5,86	6,46	5,24	0,93
H. Transportasi dan Pergudangan	24 172,25	22 245,47	3,71	3,66	2,34	-5,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6 691,56	6 413,50	1,03	1,06	6,37	-5,32
J. Informasi dan Komunikasi	8 708,38	9 346,48	1,34	1,54	6,86	6,96
K. Jasa Keuangan	10 216,63	10 484,90	1,57	1,73	3,17	2,47
L. Real Estate	5 768,85	5 845,85	0,88	0,96	2,12	0,80
M,N. Jasa Perusahaan	1 346,71	1 330,66	0,21	0,22	2,00	-2,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13 019,83	12 750,66	2,00	2,10	3,92	-3,97
P. Jasa Pendidikan	10 995,56	11 724,05	1,69	1,93	3,78	3,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4 289,67	5 318,27	0,66	0,88	6,43	19,67
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4 434,75	4 396,75	0,68	0,72	7,91	-3,07
PDRB	652 158,06	607 320,78	100,00	100,00	4,74	-2,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 ini akibat turunnya produksi dan kinerja ekonomi di sebagian besar lapangan usaha karena mewabahnya Covid-19. Sembilan lapangan usaha dari 17 lapangan usaha mengalami kontraksi. Dua lapangan usaha mengalami kontraksi mencapai lebih dari lima

persen. Sedangkan, delapan lapangan usaha masih mampu tumbuh positif, bahkan dua diantaranya tumbuh lebih dari sepuluh persen.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai lapangan usaha dominan mengalami kontraksi hingga 4,58 persen, demikian pula pada Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 2,77 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yakni Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,59 persen dan merupakan sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu sebesar 5,32 persen. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan adanya keterbatasan penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di ruang publik.

Namun demikian, masih terdapat lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 19,67 persen. Kontribusi sektor ini hanya sebesar 0,88 persen terhadap total PDRB Kalimantan Timur, namun kinerja sektor ini sangat baik di tengah hantaman pandemi Covid-19 karena berbagai kebijakan yang diterapkan pada sektor ini, sebagai upaya penanganan dan pertolongan bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19, menjadi pendorong kinerja aktivitas sektor kesehatan. Sektor lain yang juga mampu tumbuh positif yakni Informasi dan Komunikasi yang meningkat sebesar 6,96 persen. Peningkatan signifikan pada penggunaan pulsa dan kuota data internet terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang harus dilakukan secara daring, seperti bekerja/sekolah dari rumah.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang memberikan andil negatif terbesar yakni sebesar minus 2,20 persen, sedangkan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memberi andil positif pertumbuhan tertinggi sebesar 0,12 persen.

b. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Pengeluaran

Sebagai suatu ekonomi yang mengandalkan kinerja ekspor dari komoditas primer, dinamika perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan atas migas dan batubara dalam pasar global. Pada tahun 2020, komponen ekspor Kalimantan Timur mengalami kontraksi yang paling dalam hingga 2,66 persen dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp668,19 triliun. Di sisi lain, impor Kalimantan Timur sepanjang tahun 2020 juga mengalami kontraksi sebesar 0,69 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp391,14 persen. Namun demikian, pada tahun 2020, net ekspor Kalimantan Timur masih mengalami surplus, yang menandakan nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor. Secara umum, komponen net ekspor pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,60 persen.

Semua komponen PDRB pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44 persen dengan kontribusi mencapai 18,31 persen. Pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi berdampak pula pada penurunan aktivitas ekonomi yang akhirnya turut menurunkan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.6 Perekonomian Kalimantan Timur dari Sisi Pengeluaran, 2019-2020

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)	Kontribusi PDRB (%)	Laju Pertumbuhan (%)
----------------	---	---------------------	----------------------

	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Rumah Tangga	109 767,66	111 183,75	16,83	18,31	3,15	-0,44
Konsumsi LNPRT	3 238,86	3 250,20	0,50	0,54	6,77	-1,28
Konsumsi Pemerintah	26 298,93	26 163,83	4,03	4,31	7,70	-2,02
PMTB	187 939,11	187 118,74	28,82	30,81	4,79	-1,54
Perubahan Inventori	722,91	2 555,08	0,11	0,42	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	717 122,08	668 192,18	100,96	110,02	5,21	-2,66
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	392 931,49	391 143,01	60,25	64,40	5,26	-0,69
<i>Net Ekspor Antar Daerah</i>	<i>324 190,59</i>	<i>277 049,17</i>	<i>49,71</i>	<i>45,62</i>	<i>5,17</i>	<i>-4,60</i>
PDRB	652 158,06	607 320,78	100,00	100,00	4,74	-2,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

c. PDRB ADHB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota

Pada tahun 2020, penyumbang PDRB menurut kabupaten/kota tertinggi adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp149,06 triliun atau 24,46 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Selanjutnya, kabupaten yang juga cukup besar dalam memberikan kontribusi untuk menciptakan nilai tambah Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp115,80 atau sekitar 19,00 persen. Kota Balikpapan menjadi penyumbang terbesar berikutnya yakni sekitar 17,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur terkonsentrasi pada dua sektor, yaitu sektor pertambangan, yang usahanya terkonsentrasi di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, serta Industri Pengilangan Migas, yang berlokasi di Kota Balikpapan. Sedangkan penyumbang PDRB terendah adalah dari Mahakam Ulu. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang relatif masih baru sehingga relatif belum banyak terdapat ragam aktivitas ekonomi. Selain itu, akses menuju kabupaten ini juga relatif sulit sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap capaian kinerja ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif. Kabupaten/kota yang mengalami kontraksi terdalam yakni Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,44 persen, sedangkan Kota Balikpapan mengalami kontraksi yang terendah sebesar 0,69 persen.

Tabel 2.7 PDRB Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020

Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB (%)		Laju Pertumbuhan (%)	
	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	48 017,35	43 337,24	7,33	7,11	3,97	-2,77
Kutai Barat	29 180,60	27 260,01	4,46	4,47	5,67	-2,92
Kutai Kartanegara	162 022,59	149 057,82	24,74	24,46	3,83	-4,44
Kutai Timur	133 891,15	115 796,04	20,45	19,00	7,99	-3,21
Berau	39 102,61	35 469,30	5,97	5,82	5,61	-3,35
PPU	9 141,60	9 052,13	1,40	1,49	2,61	-2,34
Mahakam Ulu	2 717,63	2 770,42	0,41	0,45	5,49	-0,26
Balikpapan	104 769,78	103 600,16	16,00	17,00	4,85	-0,69
Samarinda	67 701,78	66 542,45	10,34	10,92	4,99	-1,07
Bontang	58 335,68	56 555,44	8,91	9,28	-2,16	-2,76
Jumlah 10 Kab/Kota	654 880,76	609 441,01	100,00	100,00	4,56	-2,80
PDRB	652 158,06	607 320,78			4,74	-2,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

2.3.2 Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan yang cukup krusial. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), isu kemiskinan ditempatkan pada tujuan pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Pada Maret 2021, angka kemiskinan di Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,54 persen. Besaran angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 6,10 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penambahan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Jika dipetakan menurut kabupaten/kota, pada tahun 2020, tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu sebesar 11,44 persen, sedangkan paling rendah terdapat di Kota Balikpapan yakni sebesar 2,57 persen.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak garis kemiskinan dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Pada tahun 2021, nilai indeks kedalaman kemiskinan Kalimantan Timur sebesar 1,22 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,02.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi sebaran pengeluaran atau semakin variasi pendapatan antar penduduk miskin. Pada tahun 2021, nilai indeks keparahan kemiskinan Kalimantan Timur mengalami kenaikan menjadi 0,34 dari 0,24 pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.8 Statistik Kemiskinan Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	515 414	26,77	9,23	1,04	0,21
Kutai Barat	583 532	13,78	9,29	1,23	0,28
Kutai Kartanegara	548 423	58,42	7,31	0,91	0,16
Kutai Timur	610 858	36,98	9,55	2,02	0,63
Berau	568 500	12,30	5,19	0,70	0,17
PPU	499 807	11,93	7,36	0,87	0,17
Mahakam Ulu	631 517	3,26	11,44	1,46	0,29
Balikpapan	613 622	17,02	2,57	0,38	0,12
Samarinda	719 710	41,92	4,76	0,72	0,21
Bontang	636 491	7,91	4,38	0,54	0,09
Kalimantan Timur	662 302	230,26	6,10	1,02	0,24
<i>Tahun 2021*</i>	689 035	241,77	6,54	1,22	0,34
<i>Tahun 2019</i>	609 155	219,92	5,94	0,91	0,21

Catatan: *) Angka Kemiskinan 2021 baru tersedia sampai dengan level provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.3.3 Ketenagakerjaan

Kelompok penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan kelompok penduduk yang produktif dan memiliki potensial secara ekonomi, sehingga disebut penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercatat sebanyak lebih dari 2,8 juta jiwa. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan penduduk usia kerja sebesar 1,60 persen.

Pada tahun 2021, angkatan kerja di Kalimantan Timur sebesar 1,846 juta penduduk. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1,817 juta penduduk. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar 93,17 persen, dan sisanya adalah pengangguran. Pada kelompok bukan angkatan kerja, mengurus rumah tangga memiliki proporsi yang paling besar yaitu mencapai 62,62 persen dari total bukan angkatan kerja.

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tahun 2021, TPAK Kalimantan Timur sebesar 65,49 persen. Menurut kabupaten/kota, TPAK tertinggi berada di Kabupaten Mahakam Ulu yakni 74,83 persen penduduk Kabupaten Mahakam Ulu tergolong pada kelompok angkatan kerja.

Tabel 2.9 Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur, 2019-2021

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Penduduk Usia 15 +	2 729 544	2 775 171	2 819 565
Angkatan Kerja	1 800 441	1 817 680	1 846 547
a. Bekerja	1 693 481	1 692 796	1 720 361
b. Pengangguran	106 960	124 884	126 186
Bukan Angkatan Kerja	929 103	957 491	973 018
a. Sekolah	236 877	230 776	228 949
b. Mengurus RT	589 603	611 283	609 254
c. Lainnya	102 623	115 432	134 815

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Terkait ketenagakerjaan, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan) sebagai ukuran bagi ketersediaan pekerjaan yang layak serta penciptaan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Pada tahun 2021, TPT Kalimantan Timur sebesar 6,83 artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, terdapat variasi besaran nilai TPT antar wilayah kabupaten/kota. Pada tahun 2021, nilai TPT tertinggi adalah di Kota Bontang yaitu mencapai 9,92 persen. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 2,95 persen.

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota (1)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)
Paser	4,38	4,52	5,70	66,17	67,88	65,35
Kutai Barat	4,89	4,97	5,14	66,76	71,02	72,53
Kutai Kartanegara	5,79	5,70	5,66	65,74	61,98	64,46
Kutai Timur	5,45	5,45	5,35	68,85	68,96	67,97
Berau	4,95	5,08	5,82	66,49	67,40	65,55
Penajam Paser Utara	6,03	6,22	2,95	64,33	69,04	66,85
Mahakam Ulu	3,56	3,49	3,14	69,91	76,22	74,83
Balikpapan	7,15	9,00	8,94	65,44	62,90	64,29
Samarinda	5,73	8,26	8,16	64,77	65,16	64,29
Bontang	9,02	9,46	9,92	68,06	69,24	66,63
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83	65,96	65,50	65,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Pada tahun 2020, besaran Upah Minimum Kerja (UMK) di Kalimantan Timur adalah Rp2.981.379,-. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki besaran UMK yang lebih tinggi dibandingkan dengan besaran nilai UMK Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten dengan besaran UMK tertinggi adalah Kabupaten Berau, yaitu sebesar Rp3.386.593,-. Sedangkan kabupaten dengan besaran UMK terendah di Kalimantan Timur adalah Kabupaten Paser, yaitu sebesar Rp3.025.172,-, namun demikian besaran nilai UMK Paser tersebut masih berada di atas nilai UMK Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.11 Upah Minimum Kerja (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/Kota (1)	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp) (2)
Paser	3 025 172
Kutai Barat	3 309 555
Kutai Kartanegara	3 179 673
Kutai Timur	3 140 098
Berau	3 386 593
Penajam Paser Utara	3 363 810
Mahakam Ulu	3 309 555
Balikpapan	3 069 316
Samarinda	3 112 156
Bontang	3 182 706
Kalimantan Timur	2 981 379

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

2.4 Pembangunan Manusia

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selama kurun waktu 2010 hingga 2019, perkembangan angka IPM di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020, IPM Kalimantan Timur tercatat mengalami penurunan 0,37 poin menjadi sebesar 76,24 dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,61. Walau demikian, nilai IPM ini masih termasuk ke dalam kategori tinggi bersama 2 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat, yang mengakibatkan turunnya pengeluaran masyarakat. Namun demikian, dalam kurun waktu sepuluh tahun, masih terjadi kenaikan IPM sebesar 4,93 poin.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 2.3 IPM dan Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2010-2020

Jika dirinci menurut komponennya, pada tahun 2020 masih terdapat peningkatan pada komponen penyusun IPM Kalimantan Timur, yaitu pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2020, aspek kesehatan penduduk, yang ditunjukkan oleh indikator Usia Harapan Hidup, mencapai usia 74,33 tahun meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2019 (74,22 tahun). Sementara itu, variabel pendidikan yang diwakili oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 13,72 tahun, dan angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan angka tahun 2019, yaitu 13,69 tahun. Peningkatan juga terlihat pada indikator pendidikan lainnya, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, yang meningkat dari 9,70 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 9,77 tahun pada 2020.

Sebaliknya, aspek kondisi ekonomi masyarakat diukur dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun tersebut, pengeluaran per kapita disesuaikan Kalimantan Timur adalah sebesar 11,76 juta rupiah/tahun. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2019, dimana pendapatan per kapita adalah sebesar 12,34 juta rupiah/tahun. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menurunkan kinerja ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur

Berdasarkan kabupaten/kota, angka IPM yang tinggi di Kalimantan Timur adalah untuk wilayah-wilayah kota. Dimana wilayah dengan IPM tertinggi adalah Kota Samarinda, yaitu sebesar 80,11, disusul Kota Bontang sebesar 80,02 dan Kota Balikpapan sebesar 80,01 persen. Ketiga kota berstatus "Sangat Tinggi". Ketiga kota tersebut juga memiliki IPM yang berada di atas angka IPM Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan angka IPM terendah adalah untuk Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 67,09, dengan status "Sedang".

Tabel 2.12 Statistik Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/Kota	IPM	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu/orang/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	72,04	72,62	13,10	8,55	10 344
Kutai Barat	71,19	72,86	12,90	8,47	9 712
Kutai Kartanegara	73,59	72,34	13,59	9,22	10 720
Kutai Timur	73,00	73,16	12,89	9,19	10 485
Berau	74,71	72,06	13,32	9,52	12 018
PPU	71,41	71,41	12,56	8,28	11 231
Mahakam Ulu	67,09	72,10	12,51	7,97	7 524
Balikpapan	80,01	74,49	14,14	10,68	14 549
Samarinda	80,11	74,27	14,89	10,48	14 135
Bontang	80,02	74,28	13,03	10,79	16 278
Kalimantan Timur	76,24	74,33	13,72	9,77	11 728
2019	72,04	72,52	13,00	8,54	10 767

Sumber: BPS Kalimantan Timur

BAB III ANALISIS KETIMPANGAN KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, pada tahun 2020 penduduk Kalimantan Timur telah mencapai 3,77 juta jiwa dengan capaian nilai IPM sebesar 76,24. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, maka nilai IPM Kalimantan Timur tersebut termasuk kedalam kategori “Tinggi” dan berada diatas nilai IPM Nasional, yang sebesar 71,94. Hal ini menunjukkan potensi Kalimantan Timur menjadi suatu wilayah yang memiliki keunggulan terkait pembangunan manusia jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Selain itu, dari sisi ekonomi, penciptaan kue ekonomi yang ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB Kalimantan Timur juga cukup besar. Pada tahun 2020, PDRB Kalimantan Timur mencapai Rp607,32 triliun dan menyumbang hampir dari separuh ekonomi di regional Kalimantan, atau sebesar 48,46 persen. Pada aspek sosial, besaran angka kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 6,54 persen, berada di bawah angka nasional (sebesar 10,14 persen). Beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat capaian kinerja yang cukup baik dari aspek ekonomi dan sosial wilayah Kalimantan Timur.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang masih perlu diselesaikan seperti masalah ketimpangan, termasuk ketimpangan gender. Ukuran kondisi ketimpangan gender ditunjukkan oleh indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2020, nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 85,70 dan nilai IDG sebesar 65,54. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun gambaran pembangunan manusia secara umum di Kalimantan Timur sudah cukup baik, bahkan berada pada posisi ketiga tertinggi di Indonesia, namun masih terdapat perbedaan capaian kualitas pembangunan antar kelompok penduduk, yaitu antara kelompok penduduk laki-laki dan kelompok penduduk perempuan. Selain ketimpangan gender, bentuk ketimpangan lainnya dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota dan ketimpangan produktivitas tenaga kerja. Terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, menambah semakin kompleksnya masalah ketimpangan di Kalimantan Timur.

3.1 Ketimpangan Pendapatan

Beberapa waktu terakhir, terdapat pergeseran paradigma terkait dengan pembangunan wilayah. Dari pandangan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi (peningkatan nilai PDRB) saja, menjadi pandangan baru dimana pembangunan yang berorientasi kepada penciptaan kualitas hidup (*quality of life*) yang lebih baik. Salah satu indikator perubahan paradigma tersebut adalah terdapat gerakan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap upaya pembangunan. Gerakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan (*sustainable development*), sehingga hasil pembangunan tidak saja dinikmati oleh generasi saat ini, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Dengan munculnya paradigma *sustainable development*, aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah menjamin bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pada masa sekarang. Hal ini berarti bahwa jika pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi di suatu

wilayah, sebagai satu indikator capaian pembangunan, perlu diperhatikan pula apakah manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, jika terdapat peningkatan output ekonomi suatu wilayah seharusnya dibarengi dengan adanya pembagian porsi pendapatan yang merata diantara para pelaku ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi suatu negara. Dengan semakin meningkatnya kapasitas ekonomi, maka diharapkan akan tercipta *trickle down effect*, yaitu manfaat positif dari pertumbuhan ekonomi juga akan diterima oleh masyarakat yang relatif berpendapatan lebih rendah, sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat akan meningkat. Namun, kondisi tersebut seringkali tidak dapat tercapai.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan di suatu wilayah memberikan dampak terhadap kondisi makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Banerjee dan Duflo (2003) menyatakan bahwa ketimpangan merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Berg dan Ostry (2011) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi ketimpangan yang relatif rendah di wilayah tersebut. Bahkan studi yang dilakukan Dabla-Norris dkk. (2015) menyatakan bahwa distribusi pendapatan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika proporsi pendapatan dari kelompok berpendapatan tinggi meningkat, maka terjadi penurunan besaran persentasi pertumbuhan ekonomi pada jangka menengah. Sebaliknya, jika terdapat peningkatan proporsi pendapatan dari kelompok terendah, maka besaran pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Ketimpangan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme (Jain-Chandra, 2016), diantaranya adalah melalui aspek ekonomi politik. Ketimpangan pendapatan menyebabkan peningkatan instabilitas politik, akibatnya dapat menghambat kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menyebabkan menurunnya kemampuan pemerintah dalam merespon *shock* yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, ketimpangan juga menimbulkan keterbatasan untuk memperoleh kredit yang berakibat rendahnya aktivitas investasi bagi pembentukan modal SDM dan juga kesehatan, serta menghambat kesempatan berusaha. Pada beberapa studi, ketimpangan juga ditemui sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis dan instabilitas ekonomi dan keuangan. Sebagai contoh, ketimpangan menciptakan tekanan politis untuk melakukan kebijakan pembiayaan perumahan bersubsidi, yang berpotensi berdampak kepada terjadinya krisis keuangan.

Selain ketimpangan, isu pembangunan lainnya adalah kemiskinan. Dalam paradigma *Sustainable Development*, pandangan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat mengandung arti bahwa tidak ada yang tertinggal atau "*no one left behind*", artinya bahwa kemiskinan harus ditiadakan. Secara bersama-sama, indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merupakan tiga ukuran yang dapat menjelaskan mengenai capaian kinerja pembangunan suatu negara. Harapannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya dapat memperbaiki distribusi pendapatan suatu wilayah.

Analisis hubungan antara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pilihan pertama, apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, atau yang ketiga,

apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan per kapita yang tinggi di suatu wilayah tidak menjamin semua masyarakat hidup makmur. Oleh sebab itu diperlukan suatu alat ukur yang dapat melihat apakah seluruh pendapatan di suatu wilayah telah terdistribusi secara merata. Untuk mengukur kondisi ketimpangan pendapatan suatu wilayah digunakan Indeks Gini (*Rasio gini*). Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Indeks gini mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan suatu wilayah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Jika rasio gini mendekati 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

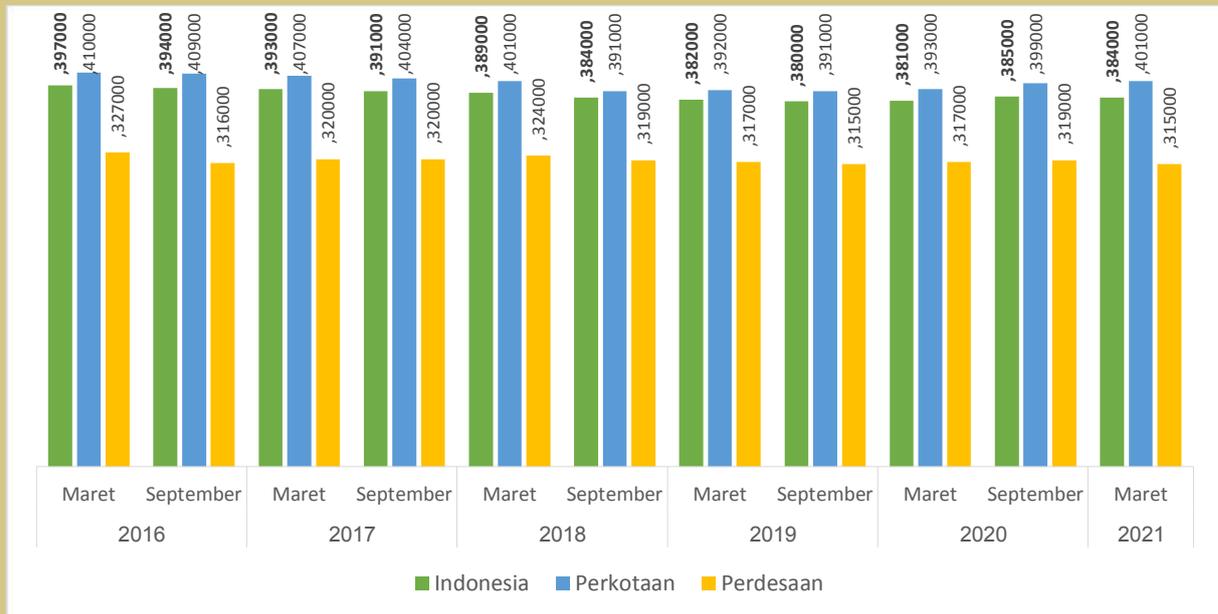
Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ditandai dengan Indeks Gini nasional sebesar 0,384 pada Maret 2021 dan menempatkan Indonesia pada negara dengan ketimpangan sedang menurut klasifikasi Bank Dunia. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, namun dampak yang dirasakan antar kelompok agak berbeda. Penurunan pendapatan pada masyarakat kelompok bawah tercatat lebih tajam dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas. Hal ini menjadi penyebab makin lebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Indeks gini bulan September 2020 tercatat sebesar 0,385 meningkat jika dibandingkan September 2019 sebesar 0,380 dan Maret 2020 sebesar 0,381. Kenaikan indeks gini mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang memburuk. Seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi, maka menurunnya tren indeks gini pada Maret 2021 dibandingkan September 2020 diharapkan dapat terus berlanjut sehingga membawa Indonesia pada jajaran negara dengan tingkat ketimpangan rendah.

Pada Maret 2021, provinsi yang mempunyai nilai Indeks Gini tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,441 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks Gini sebesar 0,256. Secara mengejutkan, provinsi terbaru Indonesia, yang *notabene* adalah pecahan Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kalimantan Utara mempunyai Indeks Gini yang jauh lebih rendah dari Provinsi Induknya. Kalimantan Utara tercatat mempunyai Indeks Gini sebesar 0,292, yang merupakan indeks terendah kedua di Indonesia. Dibanding dengan Indeks Gini nasional yang sebesar 0,384, Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan Indeks Gini yang lebih rendah. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2021 mencapai 0,334. Bila mengacu pada kategori Indeks Gini yang disebutkan sebelumnya, maka Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori sedang.

Sejak tahun 2016, ketimpangan di Indonesia tercatat mengalami penurunan walaupun lambat. Penurunan tingkat ketimpangan ini menurut BPS disebabkan oleh kenaikan yang lebih cepat pada pengeluaran perkapita per bulan untuk penduduk kelompok 40 persen terbawah dibandingkan penduduk kelompok 40 persen menengah dan kelompok 20 persen teratas.

Jika dipilah menurut wilayah, yaitu perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa penurunan ketimpangan di daerah perkotaan lebih cepat dibandingkan di wilayah perdesaan. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa

selama tahun 2016-2021, kecepatan penurunan ketimpangan di daerah perdesaan lebih cepat dibanding perkotaan. Jika di perkotaan selama kurun waktu tersebut Indeks Gini hanya mampu turun sebesar 0,009 poin, namun di wilayah perdesaan mampu turun 0,012 poin. Selain itu, secara nilai terlihat bahwa penduduk di wilayah perkotaan memiliki kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan.



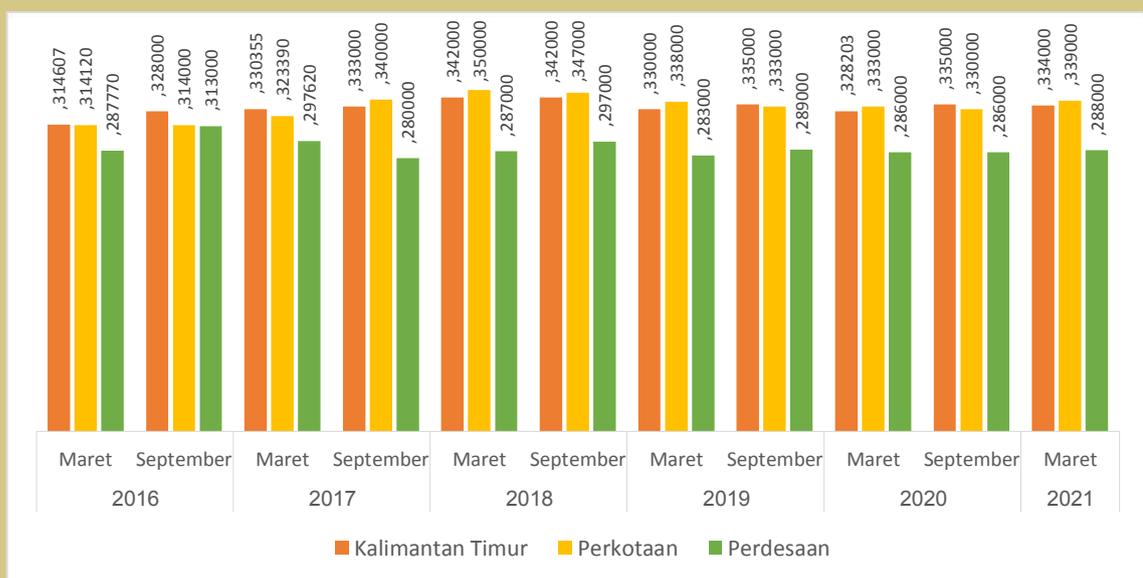
Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 3.1 Indeks Gini Indonesia Menurut Tipe Wilayah, Tahun 2016-2021

Tingginya tingkat ketimpangan perkotaan dibanding perdesaan memang lazim terjadi di negara sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi cenderung menimbulkan terjadinya ketimpangan. Hal ini sejalan dengan munculnya aglomerasi aktivitas ekonomi pada suatu wilayah yang berdampak pada peningkatan standar hidup layak di suatu wilayah. Pada kondisi tersebut, masyarakat yang telah memiliki standar hidup yang baik, misalnya dalam hal pendidikan atau keterampilan, akan dapat memperoleh peluang dari dinamika perkembangan wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang mungkin tidak dapat merespons secara cepat perubahan di wilayah tersebut karena keterbatasan terhadap akses pendidikan/keterampilan dan tidak memiliki kompetensi untuk dapat meraih peluang tersebut, yang berakibat kepada timbulnya ketimpangan di wilayah tersebut.

Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Timur

Secara nasional, terdapat perbaikan distribusi pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. Namun demikian, perbaikan tersebut tampaknya tidak dialami masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Sejak tahun 2016, terdapat kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur, bahkan kenaikannya mencapai 0,027 poin dari 0,315 pada Maret 2016 menjadi 0,342 pada tahun 2018. Penurunan ketimpangan sempat terjadi pada Maret 2020, dimana Indeks Gini mengalami penurunan menjadi 0,328, tetapi, pada periode September 2020 Indeks Gini naik tipis menjadi 0,335, sebelum kemudian kembali turun pada Maret 2021, sebesar 0,01 poin, menjadi 0,334. Namun jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada Maret tahun 2016, nilai Indeks pada Maret 2021 tersebut masih lebih tinggi. Artinya, kesenjangan pengeluaran di Provinsi Kalimantan Timur semakin lebar dalam lima tahun terakhir. Bahkan pada Maret 2021, 40 persen penduduk terbawah hanya mengkonsumsi 20,50 persen dari total pengeluaran penduduk Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Gambar 3.2 Indeks Gini Kalimantan Timur, Tahun 2016-2021

Jika dibandingkan menurut wilayah tempat tinggal, pola ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur sama dengan nasional, dimana Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat, pada Maret 2021 ketimpangan perkotaan mencapai 0,339 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,288. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk diperkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Namun demikian, hal tersebut juga tidak selalu diartikan buruk. Dengan adanya ketimpangan, terdapat insentif bagi pekerja untuk bekerja keras dalam rangka meningkatkan produktivitas serta melakukan inovasi dalam menciptakan produk yang digunakan oleh masyarakat. Sebaliknya, bagi pekerja yang kurang bekerja keras, maka peluang untuk dapat memperoleh insentif akan semakin sulit diperoleh.

Kondisi ketimpangan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses layanan masyarakat terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan

yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya ketimpangan akan membuat kondisi masyarakat menjadi rentan terhadap konflik yang disebabkan adanya kecemburuan sosial. Konflik di masyarakat akan mengganggu distribusi barang dan jasa sehingga menurunkan jumlah produksi dan mengurangi tingkat investasi, sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah secara umum.

Untuk memahami apa yang mendorong ketimpangan di Kalimantan Timur meningkat, perlu dipahami sumber daya apa saja yang dimiliki oleh rumah tangga dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Menurut *World Bank* (2016) ada empat pendorong utama ketimpangan yang mempengaruhi generasi sekarang maupun masa depan.

Pertama, ketimpangan peluang, yang terjadi akibat faktor di luar kendali individu pada saat lahir. Sepertiga ketimpangan konsumsi di Indonesia disebabkan oleh faktor di luar kendali individu, terutama faktor pendidikan orang tua dan tempat di mana mereka lahir. Hal ini kemudian berdampak kepada munculnya kesenjangan dalam akses kesehatan, sanitasi dan akses pendidikan.

Kedua, dengan semakin besarnya tuntutan untuk memiliki keterampilan yang tepat dalam ekonomi modern, imbalan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus semakin tinggi. Sementara mereka yang tidak punya keterampilan yang dibutuhkan, terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Jika kedua faktor ini digabungkan maka ketimpangan upah meningkat.

Ketiga, semakin terpusatnya sumber daya keuangan di tangan segelintir rumah tangga kaya menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi saat ini dan memperkuat ketimpangan sumber daya manusia dan keuangan pada generasi berikutnya. Keempat, guncangan (*shock*), dapat mempengaruhi ketimpangan pada tahap mana pun dengan cara mengikis kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan, menabung, dan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan.

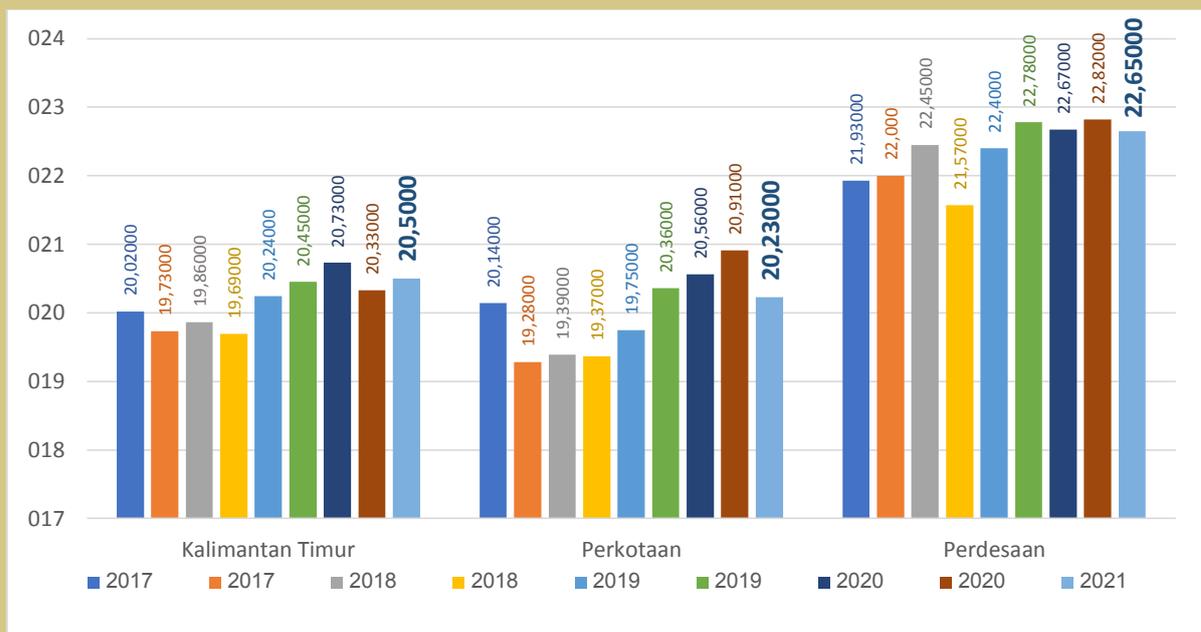
Selain ukuran Indeks Gini, *World Bank* mengeluarkan ukuran ketimpangan lain yang mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran, sebagai *proxy* dari ukuran pendapatan rumah tangga, untuk penduduk yang berada pada kelompok 40 persen dengan pendapatan terendah. Jika besaran persentase pengeluaran penduduk pada tersebut lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan bahwa terdapat ketimpangan tinggi. Sementara itu, jika proporsi pengeluaran kelompok tersebut berkisar 12 hingga 17 persen, maka dikatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat ketimpangan pendapatan pada kategori sedang atau menengah. Sedangkan jika proporsi pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok penduduk tersebut mencakup lebih besar daripada 17 persen dari total pengeluaran penduduk di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut disebut memiliki tingkat ketimpangan yang rendah.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 hingga 2021 terlihat bahwa proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah lebih dari 19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan yang ada di Kalimantan Timur termasuk kedalam kategori rendah. Bahkan pada periode Maret 2020 tercatat bahwa proporsi pengeluaran pada kelompok penduduk tersebut sebesar 20,73 persen. Namun dampak dari pandemi Covid-19 mulai dirasakan sejak pertengahan 2020, persentase ini pun mengalami turun menjadi 20,33 persen pada September 2020. Penanganan pandemi yang terus diupayakan oleh Pemerintah serta seluruh

lapisan masyarakat membuah hasil setidaknya bagi masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah dimana terjadi peningkatan proporsi pengeluaran menjadi 20,50 persen pada Maret 2021.

Jika dikaitkan dengan besaran nilai Indeks Gini, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021, yang berarti bahwa ketimpangan semakin meningkat, maka terdapat indikasi bahwa peningkatan proporsi pengeluaran tersebut tidak dialami oleh seluruh kelompok masyarakat dengan pendapatan 40 persen terbawah. Peningkatan proporsi pengeluaran hanya terjadi pada kelompok penduduk pada batas atas dari 40 persen terbawah, atau kelompok miskin/hampir miskin. Sementara itu, untuk kelompok miskin atau sangat miskin cenderung memiliki pengeluaran yang tetap.

Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, maka terlihat perbedaan kondisi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Besaran proporsi pengeluaran untuk penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah di wilayah perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pengeluaran kelompok penduduk yang sama yang berada di wilayah pedesaan. Pada Maret 2021, proporsi pengeluaran penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah di wilayah perkotaan hanya sebesar 20,23 persen, sedangkan di daerah pedesaan tercatat sebesar 22,65 persen. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kedua wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah, namun wilayah pedesaan memiliki keunggulan dalam hal pemerataan pendapatan dibandingkan wilayah perkotaan.



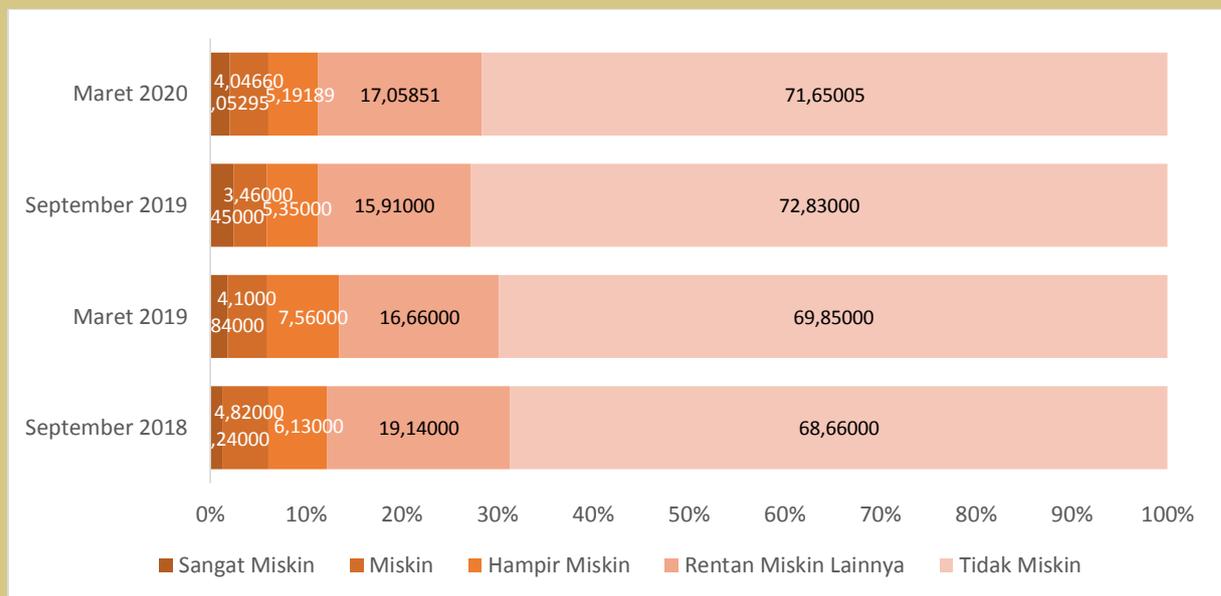
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Terendah Kalimantan Timur, Maret 2017-Maret 2021

Gambaran mengenai perkembangan kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah, secara tidak langsung juga memberikan informasi terkait dengan gambaran kondisi pada penduduk miskin di suatu wilayah. Penduduk miskin di suatu wilayah merupakan bagian dari kelompok penduduk yang memiliki pendapatan terendah. Tercatat pada Maret 2021, persentase penduduk miskin Kalimantan Timur sebesar 6,54 persen. Jika dibandingkan periode September 2020, yang tercatat sebesar 6,64 persen, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan.

Namun jika dilakukan pemilahan untuk kelompok penduduk sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin, maka terlihat bahwa penduduk sangat miskin pada Maret 2020 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya (September 2019), setelah pada September 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan Maret 2019. Pada September 2018, proporsi penduduk sangat miskin adalah sebesar 1,24 persen, mengalami peningkatan pada Maret 2019, yaitu menjadi sebesar 1,84 persen dan kembali meningkat menjadi 2,45 persen pada September 2019, sebelum akhirnya kembali turun menjadi 2,05 persen pada Maret 2020.

Selain itu, perkembangan kondisi kelompok penduduk yang termasuk kedalam rentan miskin juga perlu diperhatikan. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang besaran nilai pendapatannya telah berada diatas batas garis kemiskinan, namun belum sepenuhnya aman, karena kondisinya sangat dipengaruhi oleh adanya *shock* dalam perekonomian. Penduduk pada kategori ini akan mudah jatuh kedalam jurang kemiskinan jika perekonomian diguncang *shock*, bahkan oleh *shock* yang kecil sekalipun. Pada Maret 2020, masih terdapat 22,05 persen penduduk yang termasuk dalam kategori ini. Jika dibandingkan *year on year* dengan angka pada Maret 2019, yakni sebesar 24,22 persen, maka terdapat penurunan proporsi penduduk rentan miskin. Namun demikian, jika kelompok penduduk tersebut dirinci, maka terlihat bahwa terdapat peningkatan proporsi kelompok penduduk rentan miskin lainnya dari sebesar 15,91 persen pada September 2019 menjadi sebesar 17,06 persen pada Maret 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur terjadi peningkatan proporsi penduduk yang rawan terhadap *shock* dalam ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat memberikan jaminan bahwa penduduk, terutama yang berada pada kelompok rentan miskin, tidak terpengaruh atau tidak kembali menjadi penduduk miskin ketika guncangan dalam ekonomi terjadi di Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.4 Perkembangan Penduduk Miskin menurut Kriteria, September 2018-Maret 2020

3.2 Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Menurut Sjafrizal (2012), beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Berapa indikator yang menunjukkan ketimpangan antar wilayah adalah terdapat wilayah yang proses pembangunan infrastrukturnya, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan, yang masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah yang ketersediaan infrastrukturnya kurang akan sulit untuk diakses sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut menjadi terhambat (Bappenas, 2016). Bentuk kesenjangan wilayah lain yang sering dijumpai adalah terdapat kesenjangan antara wilayah kota dan desa. Pada wilayah perkotaan, dimana infrastrukturnya sudah lebih baik, maka terdapat konsentrasi aktivitas ekonomi, sehingga terdapat kecenderungan tingginya jumlah penduduk karena infrastruktur pemukiman, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, relatif lebih banyak tersedia dibandingkan di wilayah pedesaan.

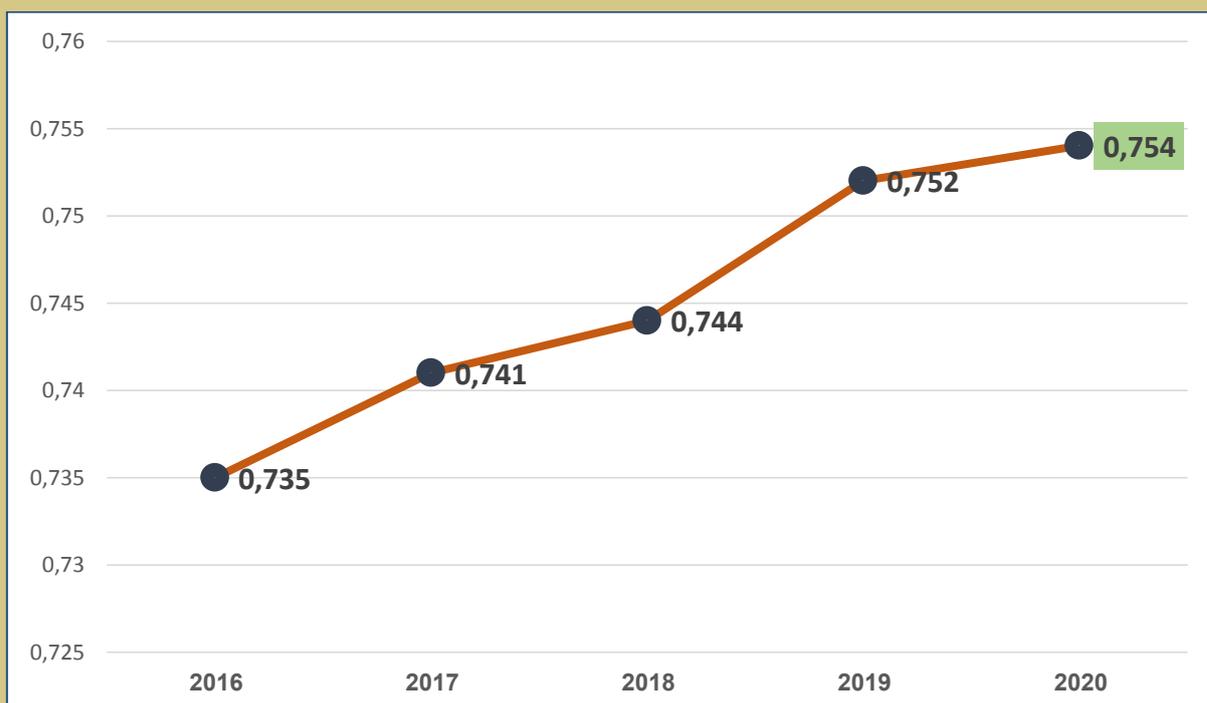
Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah timbulnya masalah sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak tersebut merupakan muncul akibatnya kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah yang kinerja pembangunan tidak cukup baik. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah cenderung akan diikuti oleh terjadinya kemiskinan. Pada akhirnya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat pada suatu wilayah akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya, karena kesulitan untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat.

Selain Indeks Gini, untuk mengukur kondisi ketimpangan wilayah digunakan indikator Indeks Williamson. Indeks tersebut merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah dengan membandingkannya dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Berbeda dengan Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan vertikal, yaitu ketimpangan antara kelompok berpendapatan tertinggi dan terendah, Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan horizontal. Indeks Williamson yang digunakan pada analisis ketimpangan ini menggunakan pendapatan per kapita suatu wilayah, produktivitas PDRB Per Kapita dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Interpretasi dari hasil Indeks Williamson adalah apabila indeks mendekati 1 (satu) berarti terjadi ketimpangan yang tinggi, sebaliknya jika mendekati 0 (nol) berarti pendapatan masyarakat antar wilayah relatif merata.

Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia

Pada tahun 2020, Indeks Williamson Indonesia tercatat sebesar 0,754, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019, yakni sebesar 0,752. Besaran Indeks tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia, terdapat ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi. Lebih lanjut, selama periode 2015 hingga 2020, nilai Indeks Williamson untuk Indonesia menunjukkan angka di atas 0,70, nilai tersebut masih mengindikasikan bahwa selama periode tersebut disparitas

antar provinsi di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan dan masih berada pada posisi ketimpangan yang cukup tinggi.



Sumber: BPS

Gambar 3.5 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Provinsi di Indonesia

Salah satu faktor penyebab tingginya disparitas antar provinsi atau wilayah di Indonesia adalah akibat terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian maupun pembangunan, yang masih terpusat di beberapa wilayah saja di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari ukuran nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah. Jika dijumlahkan, nilai PDRB dari Pulau Jawa mencapai sekitar 58,74 persen dari total nilai perekonomian Indonesia. Angka tersebut juga memberikan gambaran mengenai ketersediaan infrastruktur ekonomi di Pulau Jawa yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, sehingga biaya untuk melakukan kegiatan ekonomi relatif lebih murah dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribuan Rupiah)

PROVINSI (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
Aceh	26 851,88	28 096,71	29 521,25	30 562,54	30 472,64
Sumatera Utara	44 392,46	48 003,60	51 427,49	54 908,58	55 176,05
Sumatera Barat	37 284,56	40 194,29	42 802,66	45 207,45	44 031,59
Riau	104 861,11	105 844,80	110 384,90	109 092,90	102 291,70
Jambi	49 494,98	53 993,40	58 224,89	59 885,54	56 240,42
Sumatera Selatan	43 361,26	46 315,05	50 104,67	53 554,10	53 505,42
Bengkulu	29 076,22	31 359,48	33 822,13	36 202,48	36 307,97
Lampung	34 053,97	36 998,32	39 716,46	42 228,59	41 617,57

PROVINSI (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020** (6)
Kep. Bangka Belitung	46 402,47	48 827,25	50 081,95	50 911,43	49 772,29
Kep. Riau	106 503,78	109 332,90	116 461,40	122 237,70	113 394,70
DKI Jakarta	210 075,09	228 002,70	247 678,50	266 794,00	260 440,10
Jawa Barat	34 893,62	37 223,11	40 272,64	43 069,45	41 814,42
Jawa Tengah	31 961,95	34 234,31	36 770,96	39 217,68	38 597,52
DI Yogyakarta	29 552,53	31 664,92	34 136,93	36 708,48	35 646,18
Jawa Timur	47 491,52	51 228,45	55 410,61	59 089,96	57 650,51
Banten	42 439,73	45 275,58	48 370,15	51 182,45	47 599,84
Bali	46 211,04	50 167,07	54 433,46	58 137,73	51 180,81
Nusa Tenggara Barat	23 786,95	24 986,54	24 705,97	26 116,83	26 049,87
Nusa Tenggara Timur	16 093,51	17 165,45	18 417,54	19 560,87	19 220,10
Kalimantan Barat	33 190,65	35 984,53	38 814,73	41 851,45	41 677,07
Kalimantan Tengah	43 905,33	48 293,22	52 107,23	55 251,79	54 959,31
Kalimantan Selatan	36 022,98	38 619,54	41 046,28	42 543,96	41 624,53
Kalimantan Timur	145 343,19	165 546,60	174 164,80	175 245,90	160 109,80
Kalimantan Utara	99 112,33	111 318,50	119 413,90	130 067,00	130 831,10
Sulawesi Utara	41 246,25	44 744,20	48 105,41	51 927,61	52 317,20
Sulawesi Tengah	41 082,04	45 157,28	55 518,66	60 818,17	63 752,76
Sulawesi Selatan	43 817,39	47 822,11	52 642,08	56 977,52	56 505,19
Sulawesi Tenggara	38 022,13	41 278,78	44 492,09	47 777,79	47 243 65
Gorontalo	27 544 77	29 565,12	31 827,62	34 211,29	34 213,45
Sulawesi Barat	27 513 06	29 675,86	32 059,09	33 586,80	32 675,04
Maluku	21 599,17	22 859,29	24 268,62	25 599,14	25 254,82
Maluku Utara	24 580,75	26 686,06	29 586,12	31 609,31	32 955,45
Papua Barat	74 584,63	78 423,63	84 958,03	87 899,52	85 113,41
Papua	54 002,15	57 864,13	63 385,68	56 078,23	57 905,09

Sumber: BPS

Keterangan :

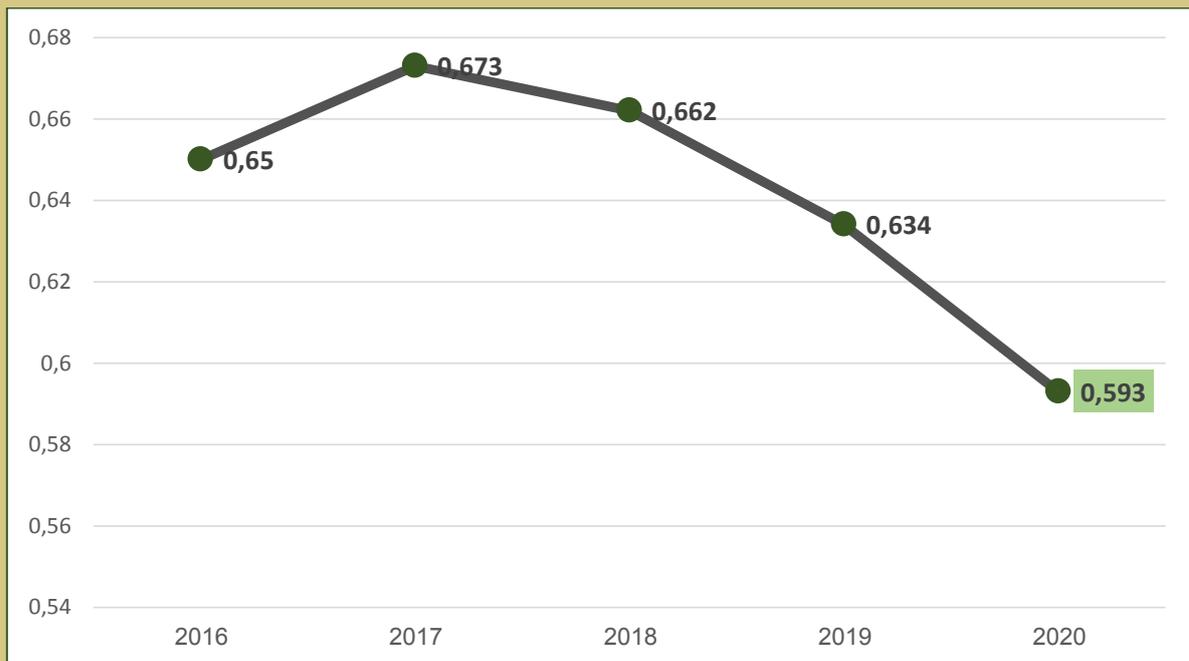
* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Jika dilihat dari angka PDRB per kapita pada masing-masing provinsi di Indonesia, terlihat bahwa selama tahun 2020 terdapat beberapa provinsi yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi (lebih dari Rp100 juta per tahun) dan sebaliknya terdapat beberapa provinsi yang PDRB per kapitanya cukup rendah (kurang dari Rp50 juta per tahun). Adapun beberapa provinsi yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jika dicermati, kecuali DKI Jakarta, provinsi-provinsi dengan nilai PDRB per kapita yang tinggi tersebut merupakan wilayah yang karakteristik ekonominya berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pada jangka pendek dimana ketersediaan sumber daya relatif masih berlimpah, maka eksploitasi dari SDA tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi. Namun, untuk jangka panjang seiring dengan berkurangnya cadangan SDA tidak terbarukan, maka besaran nilai PDRB per kapita pada provinsi-provinsi tersebut akan cenderung menurun, akibatnya pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat berkelanjutan.

Kondisi Ketimpangan Antar Wilayah Regional Kalimantan

Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun. Pada tahun 2020, indeks Williamson antar provinsi di Pulau Kalimantan sebesar 0,593. Jika dibandingkan angka Indeks Williamson tahun 2019 yang sebesar 0,634, maka angka tersebut mengalami penurunan.



Sumber: BPS

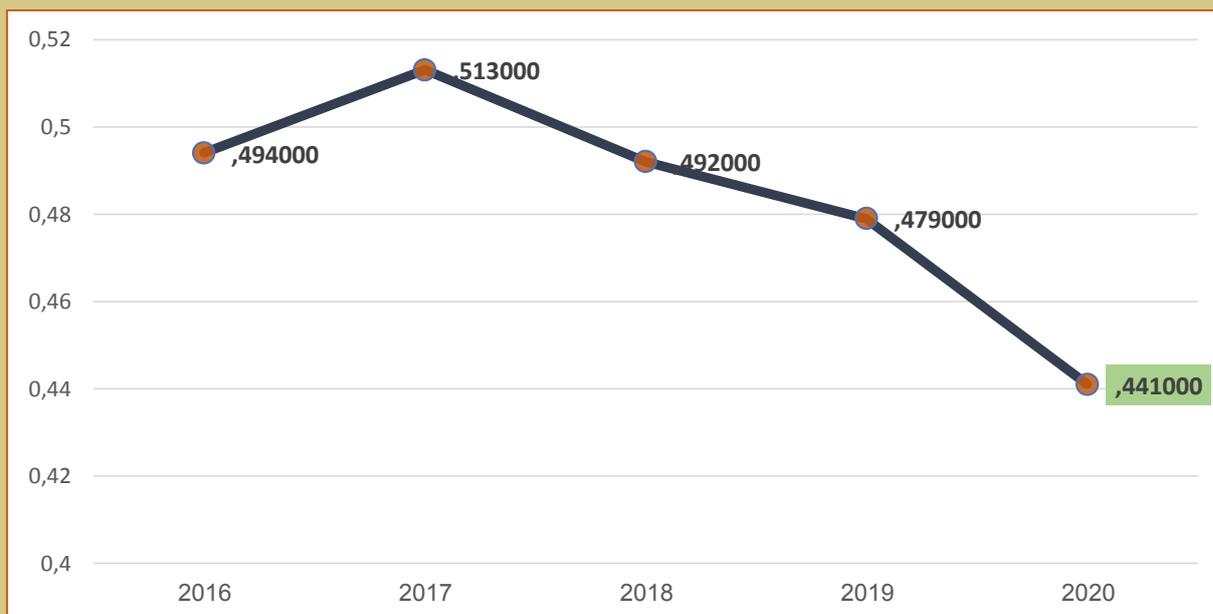
Gambar 3.6 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Provinsi Regional Kalimantan

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2020, Kalimantan Timur memegang 48,46 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalimantan Barat yang menyumbang 17,08 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 8,02 persen. Sedangkan jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi yakni mencapai 160,11 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita di Kalimantan Barat hampir seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur, yakni hanya sebesar 41,68 juta rupiah.

Kondisi Ketimpangan di Kalimantan Timur

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40 - 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, di sisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.7 Indeks Williamson PDRB Per Kapita Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

Berdasarkan PDRB per kapita di Kalimantan Timur, dapat terlihat bahwa Kota Bontang memiliki PDRB per kapita terbesar di tahun 2020 yakni mencapai 316,10 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki PDRB per kapita terendah, yakni sebesar 50,66 juta rupiah.

**Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	139 005,28	160 296,47	171 637,17	167 955,08	148 632,54
Kutai Barat	150 513,19	175 425,47	192 097,25	197 139,56	183 843,95
Kutai Kartanegara	173 968,11	198 406,84	210 467,44	206 103,62	185 648,60
Kutai Timur	285 338,32	346 117,42	353 735,18	355 988,38	296 160,38
Berau	143 437,25	161 633,70	166 269,22	168 337,47	148 896,78
PPU	49 241,18	53 774,37	55 700,21	56 811,20	55 699,25
Mahakam Ulu	82 108,10	88 868,89	95 315,69	103 038,17	104 603,23
Balikpapan	128 124,63	137 916,47	151 301,38	159 910,41	155 977,11
Samarinda	63 560,52	69 291,63	74 077,81	77 571,34	75 036,09
Bontang	331 035,96	345 145,85	337 450,41	328 241,18	312 145,42

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan :

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

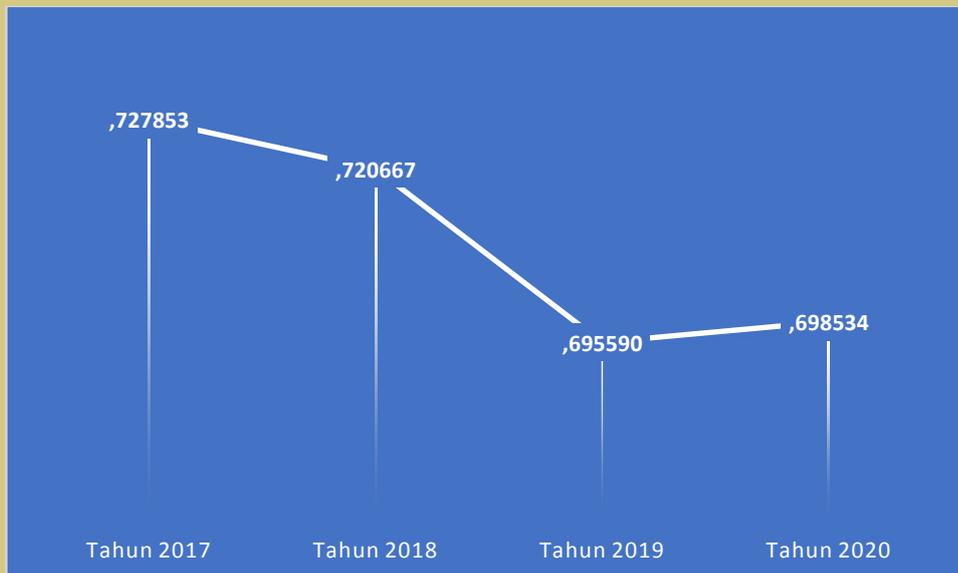
Dilihat berdasarkan tenaga kerja, sepanjang tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di Kalimantan Timur sebanyak 12.012 orang. Penurunan jumlah tenaga kerja terjadi di Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan kabupaten/kota lainnya terlihat masih terjadi peningkatan penduduk bekerja. Turunnya perekonomian Kalimantan Timur sepanjang tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 juga turut menurunkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dihitung dengan membagi nilai tambah PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja. Jika pada 2019, produktivitas tenaga kerja di Kalimantan Timur senilai 382,54 juta (?) rupiah per pekerja per tahun, turun menjadi 358,77 juta (?) rupiah per tahun. Penurunan produktivitas ini terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Balikpapan dan Samarinda yang masih mengalami peningkatan. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Timur sebesar 120 juta (?) rupiah per tenaga kerja per tahun.

**Tabel 3.3 Produktivitas PDRB Per Tenaga Kerja Menurut Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur**

Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja				Produktivitas PDRB Per Tenaga Kerja (Juta Rp)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paser	115 398	129 060	131 471	136 131	380 893	372 339	365 231	318 349
Kutai Barat	65 689	72 633	68 868	76 195	392 565	390 362	423 718	357 766
Kutai Kartanegara	320 865	337 050	355 317	339 369	465 055	480 405	455 994	439 220

Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja				Produktivitas PDRB Per Tenaga Kerja (Juta Rp)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kutai Timur	158 241	169 881	177 738	182 916	760 010	753 088	753 306	633 056
Berau	95 818	102 528	105 321	107 624	372 128	367 329	371 271	329 567
PPU	65 371	70 700	70 282	76 902	129 734	125 570	130 070	117 710
Mahakam Ulu	12 966	14 150	12 716	14 499	180 294	177 476	213 717	191 076
Balikpapan	267 604	280 301	300 974	282 258	327 785	348 552	348 102	367 041
Samarinda	370 533	368 943	403 214	393 670	157 729	172 289	167 905	169 031
Bontang	68 190	73 039	78 907	83 232	863 553	804 856	739 297	679 492
Kalimantan Timur	1 540 675	1 618 285	1 704 808	1 692 796	384 184	392 699	382 540	358 768

Indeks Williamson juga digunakan untuk melihat ketimpangan dari sisi produktivitas tenaga kerja antar kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Sepanjang tahun 2017 hingga 2020, Indeks Williamson pada produktivitas tenaga kerja menunjukkan ketimpangan tinggi dengan nilai di atas 0,5. Ketimpangan ini terjadi akibat terutama tidak meratanya jenis lapangan pekerjaan di setiap kabupaten/kota. Jika Indeks Williamson PDRB per kapita menunjukkan ketimpangan yang cenderung rendah diakibatkan hampir homogenya kondisi perekonomian di kabupaten/kota, hal ini tidak terlihat pada Indeks Williamson produktivitas tenaga kerja yang menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi.



Gambar 3.8 Indeks Williamson Produktivitas Tenaga Kerja Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur

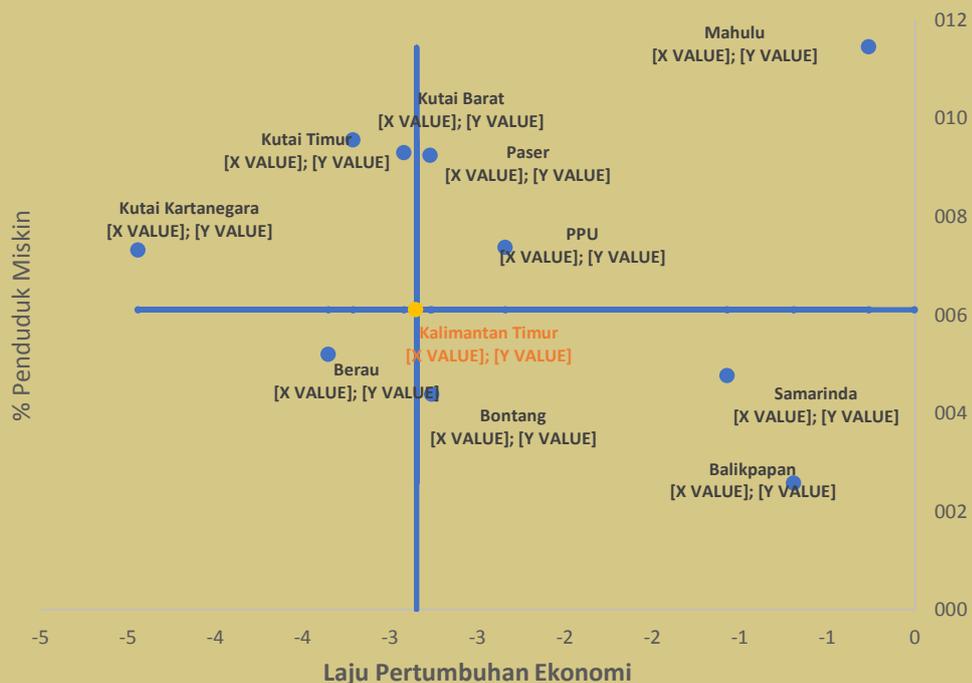
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang terlihat memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Kedua kabupaten/kota ini mengandalkan pertambangan dan industri pengolahan dalam ekonomi wilayahnya, dimana kedua sektor ini merupakan sektor yang padat modal. Sedangkan Kabupaten PPU dan Kota Samarinda terlihat memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Ekonomi Kabupaten PPU didominasi sektor pertanian dan Kota Samarinda didominasi sektor perdagangan dan

jasa, dimana sektor-sektor ini merupakan sektor yang padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja.

3.3 Tipologi Klassen

Tipologi kelas dapat digunakan untuk memetakan dan melihat keterbandingan antar wilayah. Tipologi Klassen ini akan mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin dengan membandingkan pada level provinsi Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya perekonomian serta meningkatnya angka kemiskinan di hampir seluruh wilayah termasuk di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara mengalami kontraksi ekonomi lebih dalam dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan juga memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Timur, dengan laju pertumbuhan beberapa tahun yang selalu berada di atas Provinsi Kalimantan Timur, sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah ini akan terus berkurang.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah

Gambar 3.9 Tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2020

BAB IV KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN COVID-19

Pandemi Covid-19 memunculkan beragam permasalahan, seperti masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. BPS mencatat kenaikan kemiskinan di Indonesia yang cukup signifikan dari 6,91 persen (2019) menjadi 9,78 persen (2020), juga kenaikan gini rasio dari 0,380 (2019) menjadi 0,385 (2020). Kondisi yang hampir juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, kemiskinan meningkat selama masa pandemi, dari 5,94 (2019) menjadi 6,10 (2020), dengan gini rasio meningkat antara Maret 2020 sebesar 0,328 menjadi 0,335 pada September 2021.

Ketimpangan di masa pandemi Covid-19 ini ditengarai terjadi karena hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang memperoleh peluang meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, bagi sekelompok masyarakat lainnya, pandemi tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan. Pada kelompok yang dapat meningkatkan pendapatannya, hal ini karena kelompok tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi di masa pandemi, seperti berinovasi mencari peluang kegiatan ekonomi dan beraktivitas secara daring. Hasil Survei Dampak Covid-19 bagi perilaku masyarakat Tahun 2020 mengungkapkan bahwa 4 dari 10 responden mengaku mengalami penurunan pendapatan karena terdampak Covid-19. Hasil survei ini juga menyatakan bahwa masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling merasakan dampak dari mewabahnya pandemi Covid-19.

Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2021

Tahun (1)	Tenaga Kerja Formal		Tenaga Kerja Informal	
	Jumlah (2)	Persentase (3)	Jumlah (4)	Persentase (5)
2018	1 067 874	65,99	550 411	34,01
2019	1 008 823	59,18	695 985	40,82
2020	894 756	52,86	798 040	47,14
2021	920 523	53,51	799 838	46,49

Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah

Pada masa pandemi terdapat kecenderungan peningkatan untuk jumlah tenaga kerja informal. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tenaga kerja informal sebesar 14,66 persen. Hal ini terjadi karena masyarakat yang mengalami PHK dari sektor formal beralih ke sektor informal. Motivasi pekerja pada akhirnya adalah untuk memperoleh pendapatan yang cukup hanya mempertahankan hidup.

Masyarakat yang berada pada kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung tidak stabil kondisi kerja dan pendapatannya. Kebijakan pembatasan pergerakan dalam rangka mengendalikan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan kelompok ini menjadi kelompok yang paling terdampak. Hasil Survei Dampak Covid-19 bagi perilaku masyarakat mengungkapkan 70,16 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau kurang dari Rp1,8 juta mengaku mengalami penurunan, sedangkan hanya 3 dari 10 responden kelompok berpendapatan tinggi mengaku mengalami penurunan pendapatan.



Gambar 4.1 Persentase Responden Mengaku Mengalami Penurunan Pendapatan menurut Kelompok Pendapatan Hasil Survei Pandemi Covid-19 bagi Perilaku Masyarakat, Tahun 2020

Dalam rangka mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian terutama pada sektor informal atau UMKM, Pemerintah melakukan upaya kebijakan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pemberian bantuan kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM agar para pelaku usaha ini dapat terus bertahan di tengah pandemi Covid-19.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Isu ketimpangan merupakan tantangan yang perlu dihadapi dalam proses pembangunan di Indonesia. Capaian pemerataan pendapatan di Indonesia hingga Maret tahun 2021 adalah sebesar 0,384 yang menempatkan Indonesia pada kelompok negara dengan ketimpangan sedang. Jika diamati perkembangan antar waktu, terdapat tren menurun pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun demikian, penurunan yang terjadi tidak signifikan dimana posisi Indonesia masih dalam kelompok ketimpangan sedang.

Dalam konteks kewilayahan di Kalimantan Timur, besaran Indeks Gini berada di bawah rata-rata Nasional, namun masih termasuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang. Secara umum, terdapat tren penurunan ketimpangan di wilayah Kalimantan Timur, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan besaran nilai indikator Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur. Jika dirinci menurut perkotaan dan perdesaan, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan.

Masalah ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian dan harus diatasi dalam pembangunan suatu wilayah, karena peningkatan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah berpotensi untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi (Yumna dkk. 2015). Dalam penelitiannya, Yumna dkk. menyatakan bahwa terdapat hubungan nonlinear yang berbentuk *inverted U-shape* antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hingga pada level tertentu, peningkatan ketimpangan pendapatan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan besaran ketimpangan pendapatan di suatu wilayah berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Studi empiris yang dilakukan oleh Suryadarma dkk. (2005) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu dalam mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan mempengaruhi nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, maka terjadi penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 1999, dimana kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia berada pada titik terendah dalam kurun waktu 15 tahun, dan tingkat pengurangan kemiskinan selama periode 1999 hingga 2002 cukup baik.

Lebih lanjut, Pierskall dan Sacks dalam Suryahadi dkk. (2018) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan berpotensi menciptakan konflik sosial antar masyarakat. Kondisi yang tidak kondusif tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Hal ini berdampak kepada semakin terhambatnya proses pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak dapat tercipta.

Beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah kondisi pendidikan, tingkat kesejahteraan dan sektor ketenagakerjaan (Wicaksono dkk. 2017). Tidak meratanya akses masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan memberikan dampak terhadap kondisi ketimpangan kompetensi SDM. Untuk kelompok masyarakat yang lebih mampu, mereka dapat lebih mudah mengakses layanan pendidikan, sehingga SDM pada kelompok masyarakat tersebut

memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan SDM pada kelompok lainnya, sehingga kemampuan mereka lebih baik ketika masuk ke pasar tenaga kerja. Akibatnya pada jangka panjang hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan, dimana kelompok masyarakat yang memiliki akses yang lebih baik untuk memperoleh layanan pendidikan, juga berpeluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Tingkat kesejahteraan juga sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kesejahteraan yang lebih baik akan dapat lebih menjamin masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak dapat membentuk kualitas SDM yang lebih baik. Sama halnya dengan faktor pendidikan, *gap* yang cukup tinggi pada tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan pada generasi di masa depan.

Faktor ketenagakerjaan juga berpeluang terhadap timbulnya masalah ketimpangan di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Wicaksono dkk. menunjukkan perbedaan pendapatan antar tenaga kerja juga disebabkan oleh adanya perbedaan faktor pendidikan antar tenaga kerja. Lebih lanjut, perbedaan juga terjadi antar wilayah pedesaan dan perkotaan, dimana karakteristik ketenagakerjaan antar kedua wilayah tersebut berbeda. Wilayah pedesaan cenderung didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan wilayah perkotaan didominasi oleh sektor non pertanian, yang kebutuhan skill tenaga kerja relatif lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

Dengan melihat aspek kewilayahan, maka ketimpangan juga dapat diukur salah satunya adalah dengan indikator Indeks Williamson. Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan pendapatan antar wilayah, dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur adalah antar kabupaten/kota. Pada tingkat Nasional, Indeks Williamson menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020, Indeks Williamson Indonesia adalah sebesar 0,754. Angka tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019, yang sebesar 0,752, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Sementara itu, nilai Indeks Williamson Kalimantan Timur lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional, yaitu berada di kisaran 0,40 hingga 0,50, yang menunjukkan ketimpangan yang relatif moderat bahkan termasuk rendah. Namun demikian, selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir nilai tersebut tidak mengalami penurunan berarti, yang mengindikasikan bahwa belum terdapat perbaikan yang signifikan pada ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Studi empiris yang dilakukan oleh Demurger dkk. (2002) di China menunjukkan bahwa terdapat disparitas antar wilayah, yaitu antara wilayah pesisir dan non pesisir. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan yang lebih menguntungkan wilayah pesisir, dimana provinsi-provinsi yang berada pada wilayah tersebut memiliki peluang untuk berperan dalam ekonomi internasional. Sedangkan wilayah-wilayah non pesisir menghadapi kesulitan untuk dapat berperan serta karena kondisi infrastruktur yang menyebabkan akses menuju dan keluar wilayah non pesisir menjadi relatif lebih sulit.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Cameron (2000) di Pulau Jawa menunjukkan bahwa selama periode 1984 hingga 1990 terdapat perubahan distribusi pendapatan per kapita rumah tangga. Perubahan tersebut terkait dengan perubahan struktur demografi, tingkat pendidikan, perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian, serta perubahan pendapatan dalam sektor ekonomi. Secara

umum, terdapat pengurangan kemiskinan akibat adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor non pertanian, namun demikian hal tersebut berakibat pada perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada akhirnya kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan ketimpangan.

Isu ketimpangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur terletak pada kondisi yang relatif sama dari waktu ke waktu, walaupun secara nilai indikator Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah di Kalimantan Timur relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan karena struktur ekonomi Kalimantan Timur yang relatif sama, yaitu didominasi oleh sektor Pertambangan. Bahkan, jika dikaitkan dengan penelitian Cameron, terlihat bahwa terdapat kecenderungan adanya perpindahan sumber daya dari sektor pertanian ke non pertanian. Ini ditunjukkan oleh besaran kontribusi sektor pertanian yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kalimantan Timur adalah sebesar 8,22 persen, sedangkan pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,92 persen, walaupun kemudian mengalami sedikit peningkatan sebesar 8,77. Namun peningkatan kontribusi yang terjadi pada tahun 2020, lebih disebabkan karena terjadinya penurunan kinerja sektor ekonomi lainnya selain pertanian akibat terimbas oleh pandemi Covid-19, sedangkan dari sisi besaran produktivitas sektor pertanian terlihat relatif sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan bidang pendidikan, Pemerintah telah menetapkan belanja untuk bidang pendidikan minimal 20 persen sejak tahun 2009. Belanja tersebut agar dapat digunakan untuk perbaikan sistem pendidikan, karena capaian pendidikan sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan melalui kualitas SDM yang dihasilkan dari berbagai upaya pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, belanja pendidikan yang dilakukan harus tepat sasaran untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang efektif.
2. Mempermudah akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas. Akibat dari akses ke pendidikan yang tidak merata, juga berdampak kepada masalah ketenagakerjaan. Data SE2016 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja adalah berada pada usaha berskala mikro kecil (UMK). Jika dibandingkan dengan usaha menengah besar (UMB), tingkat produktivitas UMK jauh lebih kecil dan hal tersebut berdampak kepada besaran pendapatan yang diterima oleh pekerja pada UMK. Perlu dilakukan kebijakan yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan sektor ketenagakerjaan, melalui upaya penyalarskan antara program pendidikan yang disediakan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur. Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan bahwa suplai tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur dapat terserap dalam lapangan kerja, serta dapat lebih menjamin peroleh pendapatan yang layak bagi pekerja.
3. Tingkat kesejahteraan (*wealth*) juga berdampak terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Implikasinya adalah bahwa kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses layanan jasa keuangan, terutama dalam kaitannya untuk pembiayaan aktivitas produktif masyarakat, dapat membantu menurunkan *gap* antara si miskin dan si kaya. Perbaikan akses layanan kredit yang efisien dapat membantu masyarakat tidak mampu dalam hal pembiayaan untuk aktivitas ekonomi yang

mereka lakukan. Sehingga hal ini dapat membantu kelompok yang kurang mampu untuk tetap produktif dalam menciptakan pendapatan.

4. Hal lain yang juga penting adalah pemerataan pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur, antara perkotaan dan pedesaan. Walaupun secara empiris tingkat ketimpangan di pedesaan lebih rendah, namun rata-rata tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat di wilayah perkotaan. Selain itu, di Kalimantan Timur tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perbaikan pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kalimantan Timur. Perbaikan infrastruktur juga, terutama untuk transportasi, diharapkan juga dapat menghilangkan hambatan pada jalur distribusi sehingga aktivitas ekonomi di seluruh wilayah kabupaten/kota serta di pedesaan atau perkotaan dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A., & Duflo, E. (2003). Inequality and Growth: What Can the Data Say? *Journal of Economic Growth* Vol. 8 No. 3, 267-99.
- Berg, A., & Ostry, J. (2011). *Inequality and Unsustainable Growth: Two Side of the Same Coin?* IMF Staff Discussion Note SDN/11/08. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Cameron, L. A. (2000). Poverty and Inequality in Java: Examining the Impact of The Changing Age, Educational and Industrial Structure. *Journal of Development Economics* 62, 149-180.
- Dabla-Norris, E., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., & Tsounta, E. (2015). *Causes and Consequences of Income Inequality: a global perspective*. IMF Staff Discussion Note SDN/15/13. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Demunger, S., Sachs, J. D., Woo, W. T., Bao, S., Cheng, G., & Melinger, A. (2002). *Geography, Economic Policy, and Regional Development in China*. NBER Working Paper 8897.
- Jain-Chandra, S., Kinda, T., Kochhar, K., Piao, S., & Schauer, J. (2016). *Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia*. Washington: IMF.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suryadarma, D., Artha, R. P., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2005). *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*. The Smeru Research Institute Working Paper.
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2018). *The Causes and Consequences of Increasing Inequality in Indonesia: A LongTerm View*. The Smeru Research Institute Working Paper.
- Wicaksono, E., Amir, H., & Nugroho, A. (2017). *The Sources of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Inequality Decomposition*. Asian Development Bank Institute Working Paper 667.
- World Bank. (2016). *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- Yumna, A., Rakhmadi, M. F., Hidayat, M. F., Gultom, S. E., & Suryahadi, A. (2015). *Estimating the Impact of Inequality on Growth and Unemployment*. The Smeru Research Institute Working Paper.

Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp : 0541 - 742283
<http://bappeda.kaltimprov.go.id>
e-mail : mail@bappedakaltim.com

BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR